

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pemerintahan adalah Demokrasi,<sup>1</sup> menurut Hans Kelsen demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Didalam pelaksanaannya, kekuasaan Negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.<sup>2</sup> Negara yang ideal adalah negara yang menganut sistem demokrasi didalam sistem pemerintahannya, sebab dengan demokrasi kebebasan berpendapat dijamin dan hubungan antara penguasa dengan rakyat dilakukan secara proporsional. Pemilu pada sistem demokrasi itu adalah suatu sistem pemilihan yang terlaksana secara demokratis dan mewakili setiap aspirasi serta suara masyarakat Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.<sup>3</sup> Pemilu juga dapat dimaknai sebagai instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

---

<sup>1</sup> Demokrasi merupakan salah satu sistem yang banyak dipakai oleh beberapa negara di belahan dunia. Pengertian mengenai demokrasi telah banyak disampaikan oleh para tokoh-tokoh terkemuka diantaranya yang dianggap paling populer yaitu Abraham Lincoln dikemukakan pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Tidak hanya itu Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah. (Kabul Budiyo 2012)

<sup>2</sup> Negara yang ideal adalah negara demokrasi, sebab dengan demokrasi kebebasan berpendapat dijamin dan hubungan antara penguasa dengan rakyat dilakukan secara proporsional. Negara demokrasi inilah yang disebut sebagai negara yang meniscayakan kondisi moderat atau pertengahan bagi pola relasi antara penguasa dengan rakyat. Rujuk M. Agus Muwahidin, Urgensi Demokrasi Dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur, Jurnal UIN SU, 2013. Vol. 3 (2) . hal 400-434

<sup>3</sup> Rumidan Rabi'ah dalam Khairul Fahmi, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 53.

Keterwakilan politik dalam pemilu, merupakan bentuk partisipasi politik<sup>4</sup> masyarakat yang akan menentukan arah dan roda pemerintahan Indonesia kedepannya, karena politik berjalan berdasarkan aspirasi dan suara masyarakat, baik yang terlibat di dalam pemerintahan maupun tidak. Pemilu merupakan salah satu masalah demokrasi pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.<sup>5</sup> Kualitas baik atau buruknya Pemilu juga tergantung pada kualitas partisipasi masyarakatnya. Masyarakatlah yang menentukan sesuai dengan pilihan masing-masing.

Pemilu merupakan salah satu ajang untuk terlibat langsung didalam sistem pemerintahan, elektabilitas dan tingkat popularitas seorang calon ataupun partai dapat menjadi penentu kemenangan calon tersebut, Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan, sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor kemenangan seorang calon didalam pemilu, karena masyarakat dan para pemilih melihat dan menilai dari segi internal maupun eksternal calon tersebut, serta pihak-pihak di sekeliling calon pun juga menjadi penentu kemenangan calon tersebut. Disinilah para caleg dituntut menjalankan taktik dan strateginya untuk memikat hati masyarakat.

Strategi politik dan cara yang dilakukan para calon menjadi tolak ukur dalam kemenangan calon tersebut pada pemilu, Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk

---

<sup>4</sup> Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup seperti kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya (Miriam Budiardjo. 1998 dalam Partisipasi dan Partai Politik ). Pada pilkada Kota Padang Tahun 2018, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Padang, ini ditandai dengan naiknya persentase jumlah pemilih, dari data KPU Kota Padang bahwasanya, persentase jumlah pemilih mencapai angka 64,05%. Hal tersebut jauh lebih tinggi dari pada Pilkada sebelumnya pada 2013 dengan 10 pasangan calon partisipasi pemilih hanya 57,7%.

<sup>5</sup> Lisma dan Lita Tyesta, Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia, jurnal Law Reform, vol. 13 no. 1, 2017.

merealisasikan cita-cita politik.<sup>6</sup> Menurut Clausewit dalam Schroder dalam Nursal (2004:55) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. dalam kajian lain strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun dalam Pemilukada.

Strategi tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, baik dari diri sendiri maupun dari pihak lawan. Tujuan dari penyusunan strategi ini adalah untuk menentukan langkah dalam melakukan tindakan. Dalam melihat strategi politik seorang calon ataupun partai dalam pemilu. Strategi politik<sup>7</sup> merupakan salah satu indikator yang termasuk kedalam faktor kemenangan calon, menurut penjelasan Stella Pantouw secara metaforanya kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil, karena jika pasangan calon ingin memenangkan kontestasi politik maka calon harus mempunyai tiga kombinasi dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai.<sup>8</sup>

Secara konseptual menurut Pantouw metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilukada yaitu (1) modal politik (*political capital*) (2) modal sosial (*social capital*) dan (3) modal ekonomi (*economical capital*).

---

<sup>6</sup> Peter Schrder, Strategi Politik, Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2003, hlm 5

<sup>7</sup> Peter Schrder, dalam buku Strategi Politik menjelaskan bahwa strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik . Peter Schroder. 2009, Strategi Politik edisi Revisi untuk pemilu 2009, Friedrich Naumann Siftung Fur die Freiheit, Indonesia hal 5

<sup>8</sup> Stella Maria Ignasia Pantouw. 2012. Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010). Thesis. Tidak Dipublikasikan. Univerisitas Diponogoro, hlm 3

Ketiga modal ini dikatakan dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, di mana menurut Kacung Marijan semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.<sup>9</sup> Kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar partai namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam pilkada. Menurut asumsi peneliti modal ini menjadi penting dikarenakan adanya bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) antara calon dan masyarakat yang memilihnya, maupun jaringan yang sudah berlangsung lama, kemenangan calon-pun tentu di pengaruhi oleh beberapa kapasitas.<sup>10</sup>

Menurut Hasbullah (2006), modal sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Dukungan kolektif calon diukur dengan jumlah dukungan kandidat lain menerima. Pengukuran ini juga akan menyertakan dukungan dari individu membawa pada dukungan kolektif, bukan hanya mewakili

---

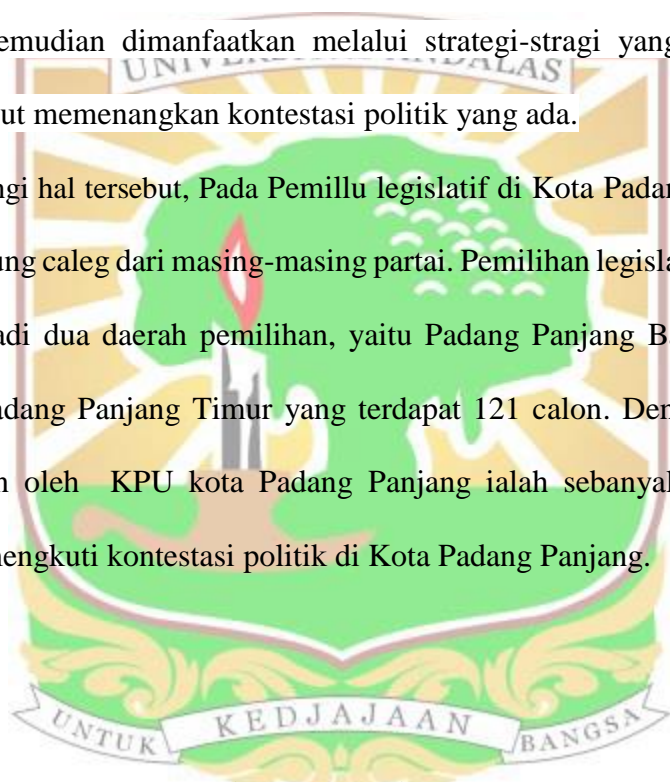
<sup>9</sup> Marijan Kacung, 2006, Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm 89

<sup>10</sup> Kapasitas yang dimaksudkan tentu tidak hanya dari partai pengusung saja, akan tetapi juga dilihat dari modal yang mereka miliki. Apakah itu modal ekonomi, modal sosial, modal politik atau modal yang dirasa perlu untuk menunjang para calon. Dari ketiga modal yaitu modal politik, modal ekonomi dan modal sosial, dalam Pilkada modal sosial menjadi penting maknanya tanpa juga mengesampingkan modal lainnya, mengapa demikian mempunyai modal sosial tidak hanya dikenal oleh para pemilih melainkan adanya pengenalan-pengenalan baik secara fisik dan sosial secara dekat. Pemilih pun bisa menilai apakah calon tersebut layak dipilih atau tidak. Modal sosial ini akan menentukan sejauh mana calon tidak hanya dikenal oleh masyarakat atau para pemilih melainkan juga diberikan kepercayaan.

individu memberikan dukungan tersebut. Pengukuran kedua menunjukkan ikatan pribadi calon kelompok-kelompok dimana kandidat calon langsung berpartisipasi diluar partai politik.

Penelitian-penelitian mengenai modal sosial yang telah ada sebelumnya lebih melihat kepada modal sosial yang dimiliki oleh individu itu sendiri, tetapi pada penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai bagaimana bentuk pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh keluarga si calon serta jaringan sosial dan jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarganya, yang kemudian dimanfaatkan melalui strategi-stragi yang dijalankan, sehingga membuat calon tersebut memenangkan kontestasi politik yang ada.

Dilatar belakangi hal tersebut, Pada Pemilu legislatif di Kota Padang Panjang diikuti oleh 16 partai dan mengusung caleg dari masing-masing partai. Pemilihan legislatif DPRD Kota Padang Panjang dibagi menjadi dua daerah pemilihan, yaitu Padang Panjang Barat yang terdapat 147 calon, Selanjutnya Padang Panjang Timur yang terdapat 121 calon. Dengan Total keseluruhan DCT yang ditetapkan oleh KPU kota Padang Panjang ialah sebanyak 268<sup>11</sup> calon anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi politik di Kota Padang Panjang.



**Tabel 1.1** **Daftar Calon**  
**Tetap (DCT) Anggota DPRD Dapil 1 dan Dapil 2 Kota Padang Panjang Tahun 2019**

No. Partai	Partai Pengusung	Dapil	Jumlah Calon	Jenis Kelamin
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 4, Perempuan 4
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 5, Perempuan 3

<sup>11</sup> Dikutip dari data KPU, pada tanggal 1 Oktober 2019, jam 20:00 WIB. <https://kota-padangpanjang.kpu.go.id/>

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Dapil 1 Dapil 2	12 6	Laki-laki 7, Perempuan 5 Laki-laki 3, Perempuan 3
4.	Partai Golongan Karya (GOLONGAN KARYA)	Dapil 1 Dapil 2	11 7	Laki-laki 6, Perempuan 5 Laki-laki 4, Perempuan 3
5.	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 5, Perempuan 3
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Dapil 1 Dapil 2	- -	-
7.	Partai Berkarya	Dapil 1 Dapil 2	- -	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 5, Perempuan 3
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Dapil 1 Dapil 2	3 3	Laki-laki 2, Perempuan 1 Laki-laki 2, Perempuan 1
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 6, Perempuan 2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Dapil 1 Dapil 2	10 8	Laki-laki 6, Perempuan 4 Laki-laki 6, Perempuan 2
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 7, Perempuan 5 Laki-laki 5, Perempuan 3
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Dapil 1 Dapil 2	12 7	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 4, Perempuan 3
14.	Partai Demokrat	Dapil 1 Dapil 2	12 8	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 5, Perempuan 3
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Dapil 1 Dapil 2	12 7	Laki-laki 8, Perempuan 4 Laki-laki 4, Perempuan 3
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Dapil 1 Dapil 2	- -	-

**Sumber : KPU Kota Padang Panjang<sup>12</sup>**

<sup>12</sup> Data KPU Kota Padang Panjang, perolehan suara partai Golongan Karya pada pemilihan anggota DPRD kota Padang Panjang periode 2019-2024

Dalam hal pencalonan, diikuti dari berbagai latar belakang bakal calon, mulai dari akademisi, pengusaha, politisi, dan dari yang memiliki usia paling muda sampai usia yang paling tua. Salah satunya Yovan Fadayan Remindo, yang merupakan caleg dengan usia paling muda dari semua caleg yang ada, ia berumur 24 tahun, dan baru saja menamatkan studinya.

